



## Komitmen Jepang dalam Meredam Kekerasan pada Perempuan Khususnya saat Pandemi *Covid-19* bersama *United Nations Women* (UN Women)

Nanda Putri Maharani\*, Imam Mahdi  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia  
\*mahdi@umy.ac.id

### *Abstract*

*This research focuses on Japan's commitment to reducing violence against women around the world because the position of women is an important issue in various aspects. Japan in collaboration with UN Women continues to strengthen partnerships to achieve significant changes in women's lives. Japan plays a role in helping women who are struggling against violence by injecting funds into UN Women to implement programs that focus on protecting women's lives and the challenges faced during the Covid-19 pandemic. This article uses the concept of gender mainstreaming which was based on the United Nations Conference in Beijing. This qualitative study aims to examine Japan's commitment to UN Women based on various literatures. This finding will explore how Japan, with a bad image that still lingers, is committed to reducing violence against women in the era of the Covid-19 pandemic with UN Women.*

**Keywords:** *Covid-19; Japan; UN Women; Violent; Women*

### **Abstrak**

Penelitian ini berfokus pada komitmen Jepang dalam meredam kekerasan pada perempuan di seluruh dunia karena kedudukan perempuan menjadi isu penting dalam berbagai aspek. Jepang bekerja sama dengan UN Women terus memperkuat kemitraan untuk mencapai perubahan yang signifikan dalam kehidupan perempuan. Jepang berperan dalam membantu perempuan yang sedang berjuang melawan kekerasan dengan menyuntikkan dana kepada UN Women untuk melaksanakan program yang berfokus pada perlindungan kehidupan perempuan dan tantangan yang dihadapi selama pandemi *Covid-19*. Penelitian ini menggunakan konsep Pengarusutamaan Gender (*gender mainstreaming*) yang dilandasi oleh *the United Nations Conference* di Beijing. Studi kualitatif ini bertujuan untuk mengkaji komitmen Jepang bersama UN Women berdasarkan berbagai literatur. Temuan ini akan mengeksplorasi bagaimana Jepang dengan citra buruk yang masih melekat berkomitmen untuk meredam kekerasan pada perempuan di era pandemi *Covid-19* bersama UN Women.

**Kata Kunci:** *Covid-19; Jepang; UN Women; Kekerasan; Perempuan*

### **Pendahuluan**

Pada masa okupasi Jepang, terjadi eksploitasi terhadap perempuan yang dijadikan budak seksual melalui sebuah sistem yang dirancang dan terorganisir. Selama Perang Asia Timur Raya, Jepang menyadari kebutuhan yang sangat penting bagi para tentara mereka. Dalam konteks tersebut, yaitu menggunakan perempuan sebagai "wanita penghibur" atau "*comfort women*". Tentara Jepang melakukan seleksi pada setiap perempuan, kemudian mengelompokkannya berdasarkan paras. Para perempuan tersebut dipaksa melayani para tentara, di mana perempuan yang cantik diberikan kepada perwira,

sementara yang memiliki paras biasa diberikan kepada prajurit. Hal ini mencerminkan perlakuan yang berbeda tergantung pada tampilan fisik perempuan tersebut (Gregor, 2017). Jepang telah terbukti melakukan eksploitasi perempuan di beberapa negara, seperti Indonesia, Korea Selatan, dan Tiongkok. Selama okupasi di Indonesia, Jepang banyak membunuh mental para perempuan. Hal tersebut dapat terlihat ketika Jepang tiba di pulau Jawa, mereka mencari perempuan yang dapat digunakan sebagai “penghibur” (Suryono, 2005). Permasalahan yang sama terjadi di Korea Selatan, hubungan antara Jepang dan Korea Selatan mengalami fluktuasi dalam konteks sejarah, termasuk dalam permasalahan *jugun ianfu* atau *comfort women*. Isu tersebut mulai menarik perhatian masyarakat Korea Selatan pada tahun 1992 (Mardatillah, 2022). Berdasarkan laporan yang tercatat, jumlah wanita yang menjadi *comfort women* selama Perang Dunia II berkisar antara 80.000—200.000, di mana 80% berasal dari Korea Selatan (Chang, 2009). Hal serupa juga terjadi di Tiongkok, Jepang melakukan hal yang sama dengan kebijakannya yang bernama *comfort women*. Kebijakan tersebut muncul sebagai hasil dari agresi militer Jepang di Nanjing, Tiongkok. Agresi tersebut menyebabkan kehancuran yang dikenal sebagai “*The Rape of Nanjing*”. Dimana pada Desember 1937, tentara Jepang menyerbu Nanjing dan melakukan aksi rudapaksa kepada lebih dari 20.000 perempuan di sana dan hal yg membuat miris adalah tantara Jepang tidak akan sungkan menembaki mereka setelah digunakan untuk menghilangkan jejak. Peristiwa ini mendapat kecaman dari media internasional (Argibay, 2003).

Kebijakan *comfort women* yang dilakukan oleh jepang tidak bertahan lama, terbukti pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 menjadi tahun kekalahan bagi Jepang di mana Hiroshima dan Nagasaki terkena bom atom oleh sekutu, sehingga meluluhlantakkan segala sendi kehidupan. Kekalahan Jepang menjadi bukti bahwa Perang Dunia II telah berakhir yang dibuktikan dengan Perjanjian San Francisco pada 8 September 1945. Salah satu isi dalam perjanjian San Francisco, yaitu Jepang tidak diberikan izin untuk memiliki angkatan bersenjata dan menutup pangkalan militer, sehingga Jepang berada di bawah pengawasan Amerika Serikat. Jepang diizinkan memiliki militer hanya untuk melindungi negara secara internal saja bukan untuk menyerang di luar dari teritori Jepang. Walaupun sudah dikenai sanksi, tetap saja Jepang masih melekat dengan citra yang buruk. Hal tersebut dilatar belakangi oleh dosa-dosa masa lalu Jepang terhadap negara-negara di bawah kedudukannya, terutama pelecehan terhadap perempuan.

Pasca berakhirnya Perang Dunia II, Jepang masih mendapatkan citra yang buruk apalagi mengenai isu perempuan. Berbicara mengenai perempuan, Jepang menjadi negara yang diragukan karena memiliki indeks *gender inequality* yang rendah (OECD, n.d.). Indeks kesenjangan gender di Jepang pada tahun 2023 mencapai 0,65 poin, yang mengindikasikan tingkat kesenjangan gender rata-rata sekitar 35%. Jepang berada di peringkat 125 dari 146 negara, menjadikan Jepang berada di belakang negara G7 lainnya dengan jarak yang cukup jauh (Statista Research Department, 2023). Bahkan kasus *gender inequality* menjadi hal nyata ketika Yoshiro Mori, mantan perdana menteri Jepang menyatakan bahwa “perempuan terlalu banyak bicara”. Dari pernyataan Yoshiro Mori, permasalahan kesetaraan gender masih menjadi isu yang hangat karena salah satu faktor yang membuat perempuan mengalami keterbatasan gerak adalah karena sebuah situasi di mana peran tradisional laki-laki masih melekat. Survei nasional terbaru yang dilakukan di Jepang pada tahun 2020, menunjukkan bahwa kebanyakan perempuan masih melakukan pekerjaan rumah tangga 3,6 kali lebih banyak daripada laki-laki. Jurnalis bernama Toko Shirakawa mengatakan jika Jepang tidak mendorong kesetaraan gender. Pemerintah hanya mengoptimalkan jumlah pemimpin perempuan, tetapi tidak menawarkan perubahan atau dukungan mendasar karena perempuan harus menanggung bebannya sendiri (Oi, 2021).

Kekerasan pada perempuan menjadi hal yang lumrah oleh beberapa orang karena tindakan tersebut kerap dilakukan bahkan dipertontonkan. Perempuan dianggap sebagai makhluk lemah, tidak berdaya, bahkan kerap menjadi korban kekerasan. Ketakutan akan kejahatan atau kekerasan terhadap perempuan juga menyoroti beberapa negara yang terkesan acuh tak acuh, sehingga tidak serius dalam mengatasi kekerasan terhadap warga negaranya (Sihite, 2007). Kasus kekerasan kian meningkat saat adanya pandemi *Covid-19* yang dialami oleh seluruh dunia, sehingga *World Health Organization* (WHO) menetapkan tanggal 11 Maret 2020 sebagai awal dari timbulnya pandemi (Rossa & Putri, 2020). Adanya *Covid-19* membuat seluruh mobilitas menjadi terhambat. Penyebaran yang ditimbulkan oleh virus ini tidak main-main karena proses terjadinya melalui kontak antar individu, yang mengharuskan penerapan *physical distancing* dalam masyarakat. WHO mengeluarkan kebijakan untuk mendorong masyarakat agar tetap tinggal di rumah (*stay at home*) dan membatasi aktivitas bersentuhan dengan orang lain (*physical distancing*). Dari kebijakan tersebut, banyak masyarakat menghabiskan waktu di rumah. Bagi sebagian orang, menghabiskan waktu di rumah adalah aktivitas yang menyenangkan karena rumah dianggap sebagai tempat yang aman. Namun, bagi beberapa orang lainnya, hal ini tidak berlaku. Permasalahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) membuat sebagian orang tidak suka menghabiskan waktu di rumah. Menurut *Secretary General of United Nations*, Antonio Guterres, ada kekhawatiran tentang peningkatan kasus KDRT di beberapa negara karena banyak orang terjebak di rumah dengan pasangan yang kasar.

Kasus kekerasan yang terjadi di seluruh dunia karena adanya pandemi *Covid-19* merupakan wujud dari pendekatan non tradisional yang merupakan isu dalam kajian Hubungan Internasional. Tampak bermunculan berbagai organisasi internasional dengan latar belakang ingin meminimalisir kekerasan demi menciptakan perdamaian, baik antar individu, kelompok, hingga negara. Organisasi tersebut adalah *The United Nations* (UN) sebagai organisasi internasional terbesar yang mulai memfokuskan isu mengenai perempuan dengan membentuk UN Women yang berorientasi pada *gender equality* dan *women empowerment*. UN Women didedikasikan untuk mendukung *gender equality* dan *women empowerment* demi mempertegas bahwa seluruh perempuan juga ingin merasakan kesetaraan dengan laki-laki, bekerja di parlemen, merancang undang-undang, membuat kebijakan, sehingga UN Women memperjuangkan hak-hak perempuan agar terpenuhi (UN Women, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana Jepang dengan citra buruk yang masih melekat berkomitmen untuk meredam kekerasan pada perempuan di era pandemi *Covid-19* bersama UN Women.

## Metode

Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir Pengarusutamaan Gender (*gender mainstreaming*) yang dilandasi oleh *the United Nations Conference* di Beijing. Pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) mempromosikan kesetaraan gender dalam *Beijing Platform for Action* dari Konferensi Dunia PBB Keempat pada tahun 1995. Karena sebelumnya ada empat konferensi dunia, pertama dilaksanakan di Mexico tahun 1975; kedua, di Kopenhagen tahun 1980; ketiga di Nairobi tahun 1985, dan yang keempat adalah Beijing pada tahun 1995. Konferensi keempat dipilih karena menandai titik balik yang signifikan dalam agenda global kesetaraan gender dengan pembulatan suara sebanyak 189 negara. Konvensi ini menunjukkan adanya cita-cita untuk mencapai kesetaraan dan kemajuan pada perempuan dalam 12 bidang penting, salah satunya “Kekerasan terhadap perempuan”. *Gender mainstreaming* adalah pendekatan strategis yang bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam semua kebijakan, program, dan kegiatan di semua tingkatan dalam suatu organisasi atau masyarakat. Tujuan utamanya adalah mencapai kesetaraan gender dan meningkatkan pemberdayaan

perempuan. Pendekatan gender mainstreaming mengakui bahwa gender memainkan peran penting dalam menjelaskan perbedaan peran, tanggung jawab, hak, dan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Pendekatan ini juga mengakui bahwa kesenjangan gender tidak hanya mempengaruhi isu-isu perempuan, tetapi juga berdampak pada pria dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam praktiknya, gender mainstreaming melibatkan analisis gender yang mendalam dalam semua kebijakan dan program yang ada. Hal tersebut berarti mempertimbangkan bagaimana kebijakan, program, atau kegiatan dapat mempengaruhi perempuan dan laki-laki secara berbeda, serta bagaimana mereka dapat menguatkan atau mengurangi kesenjangan gender (Wiasti, 2017).

*Gender mainstreaming* melibatkan penyesuaian dan perubahan sistem, struktur, budaya, dan praktik yang ada untuk mendorong kesetaraan gender. Hal ini melibatkan keterlibatan aktif perempuan dalam pengambilan keputusan, memastikan akses yang adil terhadap sumber daya dan peluang, mengatasi stereotip gender yang merugikan, dan meningkatkan perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Konsep gender mainstreaming pertama kali dikembangkan dalam *the United Nations Conference* tentang perempuan di Beijing pada tahun 1995. Sejak itu, pendekatan ini telah diadopsi oleh banyak organisasi dan pemerintah di seluruh dunia sebagai strategi penting dalam mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (Caglar, 2013).

*Gender* secara umum merupakan seperangkat gagasan yang secara jelas mengakui bahwa pembagian peran baik perempuan maupun laki-laki, yaitu setara. Pemerataan gender yang kurang adil seolah-olah perempuan lemah adalah wujud dari konstruksi sosial yang dihasilkan masyarakat, bukan kodrat atau bawaan. *Gender* adalah sebuah konsep yang percaya bahwa suara perempuan itu berharga dan tidak dapat diwakilkan. Perempuan perlu dilibatkan dalam aspek-aspek yang secara langsung memengaruhi mereka, seperti pemberdayaan perempuan. Maka, tidak mengherankan jika perempuan terlibat sebagai aktor penting yang secara resmi berpartisipasi dalam pemeliharaan perdamaian (Azizah, 2017).

Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Menurut John W. Cresswell, penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami pentingnya banyak individu atau kelompok orang mengaitkan masalah sosial dan kemanusiaan. Penelitian kualitatif menurut Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln meliputi penelitian dan pengumpulan berbagai macam material empiris seperti, studi kasus, pengalaman personal (*personal experience*), introspektif, cerita hidup (*life story*), wawancara, observasional, sejarah, interaksional, dan teks-teks visual yang menggambarkan rutinitas dan permasalahan yang terkait dengan pengalaman pribadi. Dalam penelitian ini menjelaskan pokok bahasan penelitian, unit analisis dan observasi, serta teknik pengumpulan data.

Jenis penelitian kualitatif menyelidiki atau menemukan informasi yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai upaya Jepang melalui UN Women untuk menekan aksi kekerasan pada perempuan. Penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang detail, sehingga menghasilkan penelitian yang bermakna. Jika pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang diarahkan pada suatu fenomena, maka untuk orientasi seperti itu tidak dapat dilakukan di laboratorium. Pendekatan kualitatif di sini adalah teknik penelitian yang menghasilkan studi data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan serta perilaku yang dapat diamati untuk menemukan kebenaran yang valid.

Penyusunan penelitian ini memerlukan penelusuran pustaka atau literatur mengenai topik maupun data dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan menggunakan data sekunder berupa data-data dari media seperti, website resmi UN

Women, *e-book, library research*, media elektronik, dan berbagai macam *platform* jurnal yang berkaitan dengan Jepang dalam menangani kekerasan terhadap perempuan bersama UN Women di masa pandemi *Covid-19*.

## Hasil Dan Pembahasan

### 1. Kasus Kekerasan pada Perempuan di Seluruh Dunia sebelum Pandemi *Covid-19*

UN mendefinisikan kekerasan sebagai perilaku yang berhubungan dengan fisik maupun psikis, baik dalam konteks publik maupun kehidupan pribadi (United Nations, 1993). Data mengenai kekerasan yang dikumpulkan dari survei populasi oleh penyintas dengan menggunakan data prevalensi dari tahun 2000 hingga 2018 di 161 negara yang dilakukan oleh WHO atas nama kelompok kerja antarlembaga UN di mana hampir sepertiga atau sekitar 30% perempuan di seluruh dunia mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan hingga non-pasangan (World Health Organization, 2021).

Lebih dari seperempat wanita yang berusia antara 15 hingga 49 tahun pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual setidaknya satu kali dalam hidup mereka. Tingkat kekerasan bervariasi dari 20% di wilayah Pasifik Barat, 22% di Eropa, 25% di wilayah Amerika, 33% di wilayah Afrika, 31% di wilayah Mediterania Timur, hingga 33% di wilayah Asia Tenggara. Sebanyak 6% wanita melaporkan mengalami serangan seksual oleh orang lain selain pasangan mereka, meskipun data mengenai kekerasan seksual non-pasangan terbatas. Mayoritas pelaku kekerasan seksual adalah laki-laki yang menyerang perempuan (World Health Organization, 2020).

Hampir setengah dari jumlah perempuan di Afrika mengalami kekerasan. Selama bertahun-tahun, banyak korban menderita dalam keheningan. *Gender Based Violence* (GBV) terjadi secara rahasia, di balik pintu tertutup, sering kali terjadi di lingkungan rumah perempuan itu sendiri. Menurut sebuah studi pada tahun 2020, sekitar 44% perempuan di Afrika mengalami kekerasan yang berhubungan dengan gender. Secara global, angka ini rata-rata sekitar 30%, menurut laporan PBB. GBV mencakup berbagai bentuk pelecehan, mulai dari kekerasan fisik, seksual, emosional, mutilasi alat kelamin perempuan, dan perdagangan manusia. Hal tersebut juga meliputi ancaman kekerasan, penyalahgunaan keuangan, pemaksaan, dan manipulasi. Para korban seringkali mengalami trauma psikologis dan fisik yang parah (Fröhlich, 2022).

Pada tahun 2006, sebanyak 232.960 perempuan di Amerika Serikat mengalami pemerkosaan atau pelecehan seksual. Berdasarkan *the National Crime Victimization Survey*, jumlah kejahatan yang tidak dilaporkan kepada polisi berjumlah 600 perempuan setiap harinya (Bureau of Justice Statistics, 2008). Bahkan *Federal Bureau of Investigation* (FBI) mengatakan bahwa data yang diperoleh dari lembaga penegak hukum memiliki angka yang jauh lebih rendah. Banyak kejahatan yang tidak pernah dilaporkan karena alasan korban menjaga perasaan atau privasi pelaku (US Census Bureau, 2003). Target yang dibidik adalah perempuan muda, perempuan berpenghasilan rendah, dan beberapa minoritas menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan pemerkosaan. Perempuan berusia 20—24 tahun memiliki risiko terbesar mengalami kekerasan rumah tangga non-fatal, dan perempuan yang berusia 24 ke bawah mengalami kekerasan lebih tinggi. Jika memperhatikan faktor ras, terlihat bahwa perempuan Afrika-Amerika menghadapi tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang lebih tinggi dibandingkan dengan wanita dengan kulit putih. Selain itu, perempuan Amerika-India menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga pada tingkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan perempuan dari ras lainnya (Bureau of Justice Statistics, 2008).

Dalam survei nasional, sebanyak 18% wanita yang berasal dari Asia atau Kepulauan Pasifik melaporkan bahwa mereka telah mengalami pelecehan seksual bahkan kekerasan fisik oleh pasangan mereka. Persentase ini lebih rendah dibandingkan dengan

48% wanita Indian Amerika atau penduduk asli Alaska, 45% wanita kulit hitam, 34% wanita Hispanik, dan 37% wanita kulit putih (Smith, et al., 2017).

Kasus yang sama pun terjadi, sehingga Uni Eropa dan negara anggotanya bekerja sama secara kolaboratif guna mencegah dan melawan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling terorganisir dan umum di seluruh dunia. Sebuah fakta mengejutkan adalah satu dari setiap tiga perempuan pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual, dengan mayoritas kejadian ini dilakukan oleh pasangan mereka. Tingkat kekerasan online juga tengah meningkat, terutama yang menargetkan perempuan muda dan mereka yang terlibat dalam kehidupan publik, seperti jurnalis dan politisi. Di Uni Eropa, sekitar sepertiga dari perempuan mengalami pelecehan seksual di tempat kerja. Uni Eropa dan negara anggotanya mengambil langkah-langkah di berbagai bidang untuk mengakhiri kekerasan berbasis gender, melindungi perempuan yang menjadi korban kekerasan, dan menghukum para pelaku kejahatan (European Union, 2023).

## 2. Kasus Kekerasan pada Perempuan saat Pandemi Covid-19

Berdasarkan perkiraan dari *United Nations Population Fund* (UNFPA), dampak pandemi Covid-19 berpotensi menyebabkan peningkatan sebanyak 15 juta kasus kekerasan berbasis gender (GBV) di seluruh dunia setiap tiga bulan. Angka ini didasarkan pada peningkatan sebesar 20% dalam kasus kekerasan selama periode *lockdown*. Informasi yang telah disampaikan melalui laporan media dan dirangkum di bagian ini menunjukkan bahwa peningkatan sebesar 20% merupakan perkiraan konservatif, karena beberapa negara melaporkan adanya peningkatan drastis panggilan ke saluran bantuan terkait kekerasan dalam rumah tangga. Terlepas dari keterbatasan data yang ada, jelas bahwa kombinasi dari *lockdown* dan pandemic mempermudah terjadinya kekerasan dan menyulitkan korban untuk melapor kejadian atau mencari bantuan. (UNFPA, 2020).

Sejak munculnya pandemi Covid-19, data yang telah muncul menunjukkan adanya peningkatan intensitas *Violence Against Women* (VAW) secara global. Dalam periode satu tahun terakhir, diperkirakan sekitar 243 juta perempuan berusia 15—49 tahun telah menjadi korban kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan mereka (UN Women, 2020). Ketika menghadapi situasi darurat dan wabah penyakit, kekerasan terhadap perempuan cenderung meningkat. Oleh karena itu, dampak pandemi Covid-19 terhadap kekerasan masuk ke dalam kasus yang lebih luas (Fraser, 2020). Sebagai contoh, selama wabah Ebola pada tahun 2014, sebagian Sierra Leone mengalami peningkatan tingkat kehamilan remaja sebesar 65%, yang kemungkinan disebabkan oleh peningkatan kasus pemerkosaan selama epidemi tersebut (Yasmin, 2016). Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan pengalaman kekerasan yang dialami perempuan. Bagian ini mengidentifikasi tiga faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan kekerasan selama pandemi Covid-19: (1) peningkatan paparan terhadap pelaku karena adanya perintah *lockdown*, (2) adanya lingkungan yang penuh tekanan bagi para pelaku, dan (3) minimnya layanan dukungan yang tersedia.

Ketika membandingkan kasus kekerasan pada perempuan yang di alami sebelum dan saat terjadinya pandemi *Covid-19*, memberikan data yang cukup mengkhawatirkan karena terjadi lonjakan kekerasan saat penerapan *lockdown*. Berikut perbedaan lonjakan data kasus kekerasan yang terjadi sebelum dan saat pandemi *Covid-19*:

### a. Benua Afrika

Tepatnya Nigeria di mana data dari *National Demographic and Health Survey* (NDHS) tahun 2018 menunjukkan bahwa 31% wanita berusia 15—49 tahun mengalami kekerasan fisik, 9% mengalami kekerasan seksual, dan 6% mengalami kekerasan fisik selama kehamilan. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan

NDHS tahun 2013 yang mencatat angka sebesar 25% (National Population Commission, 2019). Data mengenai kekerasan dalam rumah tangga di Nigeria menunjukkan bahwa selama penerapan kebijakan lockdown, terjadi peningkatan kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual. Survei yang dilakukan oleh *Partners West Africa Nigeria* (PWAN) di tiga negara bagian utara Nigeria, yaitu FCT, Borno, dan Kano, mengungkapkan adanya peningkatan jumlah kasus *Sexual and Gender Based Violence* (SGBV) yang dilaporkan. Menurut *the Domestic and Sexual Violence Response Team* (DSVRT), terdapat peningkatan hampir 50% dalam jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan setiap hari sejak pandemi *Covid-19*, dibandingkan sebelum adanya *Covid-19* yang hanya sekitar 8 kasus yang dilaporkan (Partners West Africa Nigeria, 2020).

b. Benua Amerika

Saat Covid-19 diumumkan sebagai pandemi, akses korban terhadap kesejahteraan sosial, layanan kesehatan, keamanan publik, dan layanan hukum mengalami masalah, sehingga menjadi kendala besar bagi para perempuan di Brazil karena layanan kesehatan dan kepolisian biasanya menjadi opsi utama. Menurut data dari Ligue 180 (*hotline* 180), kebijakan lockdown yang diberlakukan sejak awal *Covid-19* menyebabkan peningkatan sekitar 9% dalam jumlah panggilan ke saluran bantuan untuk melaporkan kekerasan terhadap perempuan. Menurut *the National Human Rights Ombudsman of the Ministry of Women, Family and Human Rights*, antara tanggal 1 dan 16 Maret 2020, mereka menerima 3.045 panggilan dan menerima 829 pengaduan, sedangkan antara tanggal 17 dan 25 di bulan yang sama, jumlah panggilan meningkat menjadi 3.303 panggilan yang diterima dengan 978 pengaduan yang dilaporkan. Di Rio de Janeiro, data dari Kantor Kejaksaan Negeri menunjukkan adanya peningkatan sebesar 50% dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga selama minggu pertama setelah penerapan *lockdown*, dengan sebagian besar kasus terkait kekerasan terhadap perempuan. Sementara itu, di Paraná, terjadi peningkatan sebesar 15% dalam pengaduan kekerasan dalam rumah tangga yang diterima oleh kepolisian selama minggu pertama *lockdown*. Hal serupa juga terjadi di wilayah bagian Ceará, Pernambuco, dan São Paulo (Vieira, Garcia, & Maciel, 2020).

c. Benua Asia dan Pasifik

Sebelum pandemi *Covid-19*, WHO memperkirakan sekitar 30% perempuan berusia 15—49 tahun pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan mereka (García-Moreno, et al., 2013). Kasus tersebut dikategorikan menjadi *Gender Based Violence* (GBV) yang merupakan bagian dari “pandemi global” (Guterres, 2018). Berdasarkan *High Prevalence of GBV before the Pandemic*, Mongolia, Myanmar, dan Pakistan menjadi negara yang mengalami 60% GBV tertinggi terutama bagi para perempuan (Hayashi, et al., 2022).

Apabila peningkatan kasus kekerasan tidak ditangani dengan baik, maka kesehatan korban akan semakin parah. Menurut El-Serag & Thurston, perempuan yang telah mengalami kekerasan oleh pasangan mereka memiliki risiko yang tinggi sehingga menimbulkan berbagai gangguan mental, termasuk gangguan suasana hati, gangguan kecemasan, gangguan makan, gangguan stres pasca trauma, serta kemungkinan penyalahgunaan zat atau alkohol. Di samping itu, disebutkan bahwa korban akan mengalami gangguan kesehatan fisik, termasuk penyakit kardiovaskular, nyeri kronis, gangguan tidur, masalah saluran pencernaan, infeksi menular seksual, dan cedera otak traumatis.

Pandemi *Covid-19* telah memicu peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan di berbagai belahan dunia. Berikut adalah beberapa bentuk kekerasan yang dilaporkan selama masa pandemi ini:

- a. Kekerasan dalam rumah tangga  
Pembatasan pergerakan dan isolasi yang diakibatkan oleh pandemi telah meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan yang terjebak dalam rumah bersama pasangan yang kejam atau penganiaya mungkin menghadapi peningkatan kekerasan fisik, emosional, atau seksual.
- b. Peningkatan pelecehan online  
Dengan lebih banyaknya orang yang menghabiskan waktu di internet selama pandemi, pelecehan online terhadap perempuan juga mengalami peningkatan. Perempuan dapat menjadi korban pelecehan verbal, ancaman, penyebaran konten pornografi yang tidak diinginkan, bahkan serangan *cyber* lainnya.
- c. Kekerasan seksual  
Isolasi sosial dan ketidakamanan yang disebabkan oleh pandemi dapat meningkatkan risiko kekerasan seksual terhadap perempuan. Kekerasan seksual dapat terjadi di dalam rumah tangga, di tempat kerja, atau dalam situasi lain di mana perempuan merasa rentan.
- d. Eksploitasi ekonomi  
Dampak ekonomi dari pandemi, seperti pemutusan hubungan kerja, pengurangan jam kerja, atau penurunan pendapatan, dapat memperburuk kondisi perempuan yang berada dalam hubungan yang tidak sehat. Pasangan atau pelaku kekerasan sering menggunakan ketergantungan ekonomi sebagai alat untuk mengendalikan perempuan.
- e. Kesulitan akses terhadap layanan perlindungan  
Pembatasan pergerakan dan penutupan sebagian besar layanan selama pandemi dapat menghambat perempuan dalam mengakses bantuan dan perlindungan. Layanan perlindungan seperti pusat krisis, tempat penampungan, atau lembaga bantuan hukum mungkin tidak tersedia atau sulit dijangkau.

Penting untuk mengenali bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak terbatas pada daftar di atas dan mungkin ada bentuk-bentuk lainnya yang muncul selama pandemi ini. Organisasi dan pemerintah di berbagai negara bekerja untuk meningkatkan kesadaran, menyediakan dukungan, dan mengatasi tantangan ini dalam upaya melindungi perempuan dari kekerasan selama pandemi.

Pemerintah tidak dapat mengendurkan kebijakan *lockdown* atau *work from home*, karena kebijakan tersebut terbukti efektif dalam menekan penyebaran virus. Namun, WHO merekomendasikan lima tindakan atau langkah yang dapat diambil oleh pemerintah: (1) meningkatkan alokasi anggaran untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan sebagai respons terhadap pandemi *Covid-19*, (2) memberikan pelayanan secara ekstra bagi korban kekerasan, terutama perempuan, (3) meningkatkan layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan melalui penyediaan sumber daya dan fasilitas pendukung yang memadai, (4) menjadikan perempuan sebagai fokus perubahan dan pemulihan dalam penanganan kekerasan, (5) memisahkan data kekerasan terhadap perempuan secara gender untuk memahami lebih lanjut dampak dan penyebabnya (WHO, 2020).

### **3. Komitmen Jepang bersama UN Women Meredam Kekerasan**

Sejak didirikan, Jepang telah menjadi salah satu pendukung utama UN Women, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Jepang telah secara konsisten memberikan dukungan yang kuat kepada program-program UN Women, dengan fokus utama di wilayah Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Kemitraan antara Pemerintah Jepang dan UN Women telah berkembang secara signifikan, dengan fokus yang erat terkait dengan prioritas pembangunan dan isu gender. Pemerintah Jepang mengakui peran penting yang dimainkan oleh perempuan dalam perekonomian nasional dan dalam kehidupan keluarga.



Hal ini telah mendorong investasi yang lebih besar dalam partisipasi perempuan di dunia kerja, leadership, dan peningkatan retensi perempuan, baik di sektor publik maupun swasta. Implementasi perspektif dan kebijakan gender telah memberikan dampak positif pada masyarakat dan ekonomi di dalam dan luar Jepang.

Sejak berdirinya UN Women, Pemerintah Jepang telah menjadi kontributor, terutama melalui sumbangan sumber daya tambahan. Sejak tahun 2011 dan 2020, Jepang telah memberikan kontribusi sebesar total USD 156,8 juta. Pada tahun 2020, Jepang merupakan salah satu dari enam penyumbang terbesar dari sumber daya pemerintah dengan total USD 22,5 juta, serta menjadi penyumbang terbesar ketiga belas untuk sumber daya reguler dengan jumlah USD 3,9 juta (UN Women, n.d.).

Jepang memberikan penekanan yang besar pada pemberdayaan perempuan dan partisipasi mereka di tempat kerja sebagai prinsip utama dari reformasi kebijakan ekonomi Jepang yang sedang berlangsung, serta sebagai prioritas strategis dalam kerja sama pembangunan Jepang. Sejak tahun 2014, Jepang terus meningkatkan kontribusinya kepada UN Women, dan pada tahun 2021, Jepang menjadi penyumbang pemerintah terbesar kesembilan dengan total USD 21,2 juta. Jepang juga merupakan penyumbang pemerintah terbesar keempat dalam hal sumbangan sumber daya tambahan, dengan jumlah USD 17,5 juta.

Prioritas Jepang dan UN Women secara keseluruhan sejalan dalam beberapa bidang, termasuk mengakhiri kekerasan seksual dalam konflik, mendorong infrastruktur yang responsif terhadap isu gender, memperhatikan pendidikan perempuan, dan meminimalisir risiko kekerasan. Pada tahun 2021, Pemerintah Jepang bergabung dengan *the Action Coalition on Gender-Based Violence* dan menjadi penandatangan *the Women, Peace and Security and Humanitarian Action* (WPS-HA). Jepang juga termasuk dalam 12 negara yang memiliki *National Committee for UN Women* (UN Women, 2021).

Jepang dan UN Women memiliki komitmen yang sama terhadap kesetaraan gender. Mandat dan pekerjaan UN Women berkaitan erat dengan prioritas pembangunan Jepang, yang memberikan penekanan utama pada hak-hak perempuan dan anak perempuan. Pemberdayaan ekonomi perempuan, hak dan kepemimpinan perempuan, serta mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan adalah tujuan khusus yang menjadi perhatian bersama bagi kita (Tijerina, 2020)

Jepang telah memberikan kontribusi dalam berbagai program yang berurusan dengan isu perempuan. Pada tahun 2018, Jepang memberikan dana sebesar USD 5,2 juta untuk program UN Women yang berjudul "*Empowered Women, Peaceful Communities: Preventing Violent Extremism in Asia*". Program ini aktif di Bangladesh, Indonesia, dan Filipina. Program tersebut berhasil mencapai lebih dari satu juta orang dan memperkuat pemahaman mereka tentang peran perempuan dalam *Preventing Violent Extremism* (PVE) dan dinamika gender terkait ancaman tersebut. Sebanyak 76 komunitas terlibat dalam berbagai inisiatif, termasuk dialog dengan masyarakat sipil dan mitra pemerintah untuk mencari solusi yang sensitif terhadap isu gender. Selain itu, lebih dari 2.600 perempuan telah menerima pelatihan dalam bidang mata pencaharian dan kepemimpinan untuk mendukung keterlibatan mereka dengan komunitas, dan mengembangkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Pendanaan tambahan untuk program ini dilanjutkan pada tahun 2019 dan 2020, dengan fokus terutama pada Bangladesh. Tujuan umum program tersebut mencakup advokasi kebijakan untuk menerapkan pendekatan yang sensitif terhadap isu gender dalam PVE di Bangladesh dan Asia Tenggara, studi regional, dan pertukaran pengetahuan di tingkat regional (Brown, 2020).

Program "*Joint Action for the Elimination of Violence Against Women and Girls in the Arab States Region*" difokuskan pada Aljazair, Mesir, Irak, Yordania, Lebanon, dan Maroko, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang mendukung di mana

perempuan dapat hidup bebas dari kekerasan. Antara tahun 2018 dan 2019, program ini melakukan pemetaan dan penilaian terhadap hukum, kebijakan, layanan, dan sistem pengumpulan data yang ada, dengan tujuan mengembangkan program-program berdasarkan bukti yang spesifik untuk setiap negara guna mengakhiri kekerasan berbasis gender di wilayah tersebut. Hasil dari penilaian ini termasuk publikasi *Country Gender Justice Studies* yang memberikan informasi yang penting dan menjadi dasar untuk pengumpulan data dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Brown, 2020).

Antara 2018 dan awal 2020, Pemerintah Jepang telah menyediakan lebih dari USD 14 juta untuk mendukung program UN Women's leadership, empowerment, access, and protection (LEAP), yang bertujuan untuk memberikan dukungan kepada perempuan yang terkena dampak konflik dan krisis kemanusiaan. Di negara-negara seperti Mesir, Irak, dan Yordania, program ini telah memberikan layanan yang mendesak dan penting kepada lebih dari 24.000 perempuan yang terkena dampak konflik, dengan memastikan mereka memiliki akses ke peluang ekonomi, layanan multisektoral yang efektif, mekanisme perlindungan, dan dukungan pemberdayaan. Di Yaman, program ini telah memberikan manfaat kepada lebih dari 6.200 perempuan melalui perlindungan yang nyata dan intervensi yang berkaitan dengan mata pencaharian dan perumahan yang baru dikembangkan dan dilengkapi. Lebih dari 1.400 perempuan juga telah mendapatkan manfaat dari 6 tempat penampungan yang ditargetkan, dan sebanyak 13 spesialis psikososial telah menerima pelatihan. Di Kenya, program ini telah memberikan dukungan kepada perempuan yang tinggal di lingkungan pengungsi dan komunitas tuan rumah, dengan tujuan meningkatkan ketangguhan mereka terhadap dampak bencana dan situasi darurat, serta membantu mereka hidup bebas dari kekerasan. Secara keseluruhan, program ini telah memberikan manfaat yang signifikan bagi perempuan yang terkena dampak konflik dan krisis kemanusiaan di berbagai negara, dengan fokus pada layanan perlindungan, pemberdayaan ekonomi, dan dukungan psikososial (Brown, 2020).

Sehingga, relevansi antara Jepang yang melakukan kerja sama dengan UN Women terhadap *gender mainstreaming* mengacu pada proses mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kegiatan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dan mempromosikan kesetaraan gender. Jepang telah mengakui pentingnya *gender mainstreaming* dan secara aktif terlibat dalam mempromosikannya baik di dalam negeri maupun internasional (Council of Europe).

Di Jepang, *gender mainstreaming* telah menjadi prioritas dalam kebijakan dan agenda pembangunan nasional mereka. Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai inisiatif untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai sektor. Misalnya, Undang-Undang tentang Promosi Partisipasi dan Kemajuan Perempuan di Tempat Kerja diperkenalkan untuk mempromosikan partisipasi perempuan di dunia kerja dan untuk mengatasi kesenjangan upah gender. Jepang juga bekerja untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam posisi kepemimpinan melalui prakarsa seperti "30% club" dan "*Women's Empowerment Principles*".

Selain itu, Jepang telah mendukung upaya *gender mainstreaming* secara global. Ini telah menjadi advokat yang kuat untuk kesetaraan gender di dalam UN dan telah menyumbangkan dana yang signifikan kepada UN Women, entitas yang bertanggung jawab atas kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Jepang telah memberikan dukungan keuangan untuk berbagai program dan inisiatif UN Women, termasuk yang ditujukan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan, mempromosikan kepemimpinan perempuan, dan mendukung perempuan yang terkena dampak konflik dan krisis (Tijerina, 2020).

## **Kesimpulan**

Jepang telah menjadi mitra utama UN Women sejak organisasi tersebut didirikan. Kemitraan antara UN Women dan Jepang mencakup berbagai bidang, seperti implementasi program di negara-negara berkembang, dialog kebijakan, dan kolaborasi dalam konferensi internasional terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. UN Women dan Jepang terus memperkuat kemitraan mereka untuk mencapai perubahan yang signifikan dalam kehidupan perempuan dan masyarakat mereka. Jepang berperan dalam membantu perempuan yang sedang berjuang melawan kekerasan dengan berbagai program yang didukung oleh UN Women. Program-program ini mencakup kegiatan pemberdayaan perempuan, pembentukan kewirausahaan agar perempuan dapat hidup secara mandiri dan membangun kesejahteraan mereka. Selain itu, Jepang juga menyediakan layanan yang dibutuhkan bagi perempuan untuk memulihkan kesehatan mental mereka setelah mengalami kekerasan baik secara seksual maupun verbal selama pandemi Covid-19. Upaya yang dilakukan oleh Jepang ini bertujuan untuk mencapai abad ke-21 tanpa adanya pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan. Selain itu, hal ini juga merupakan bagian dari diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Jepang dalam mempromosikan kesetaraan gender di seluruh dunia, serta memberikan dukungan kepada setiap lapisan masyarakat. Kesimpulan dari "Komitmen Jepang dalam Meredam Kekerasan pada Perempuan Khususnya di Era Pandemi Covid-19 bersama UN Women" adalah bahwa Jepang telah berkomitmen untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan, terutama selama pandemi Covid-19, dengan bekerja sama dengan UN Women. Jepang telah mengakui bahwa pandemi Covid-19 telah meningkatkan risiko kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan eksploitasi. Dalam upaya untuk melawan masalah ini, Jepang telah menjalin kemitraan dengan UN Women, sebuah lembaga UN yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan persamaan gender. Melalui kemitraan ini, Jepang berkomitmen untuk mengambil tindakan konkret untuk melindungi perempuan dari kekerasan. Mereka mungkin telah mengadopsi kebijakan dan langkah-langkah seperti peningkatan akses terhadap layanan pendukung dan perlindungan bagi korban, pendidikan dan kesadaran untuk masyarakat mengenai kekerasan terhadap perempuan, serta penegakan hukum yang lebih kuat terhadap pelaku kekerasan. Dalam konteks pandemi Covid-19, Jepang mungkin juga telah bekerja untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan dan dukungan sosial. Mereka mungkin juga telah melakukan upaya untuk meningkatkan pemantauan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan selama masa lockdown atau pembatasan pergerakan. Jadi, Jepang telah berkomitmen untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan, terutama selama pandemi Covid-19, dengan bekerja sama dengan UN Women. Komitmen ini mencakup langkah-langkah untuk melindungi perempuan, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memastikan akses terhadap layanan yang diperlukan. Melalui komitmennya terhadap pengarusutamaan gender, Jepang bertujuan untuk menciptakan masyarakat di mana kesetaraan gender tercapai dan perempuan dapat berpartisipasi penuh dan berkontribusi dalam semua aspek kehidupan. Upaya dan inisiatif pemerintah mencerminkan pengakuan mereka akan pentingnya mengatasi kesenjangan gender dan mempromosikan kesempatan yang sama bagi semua individu.

## Daftar Pustaka

- Argibay, C. M. (2003). Sexual Slavery and the Comfort Women of World War II. 21 *Berkeley J. Int'l Law*, 375.
- Atmadja, M. K. (1999). *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Azizah, N. (2017). *Gender dan Politik: Mengapa Konstruksi Gender bersifat Politis*. Yogyakarta: The Phinisi Press.
- Belarmino, M., & Roberts, M. R. (2019). Japanese Gender Role Expectations and Attitudes: A Qualitative Analysis of Gender Inequality. *Journal of International Women's Studies*, 272-288.
- Brown, R. (2020, September). *UN WOMEN AND JAPAN*. Retrieved from unwomen.org: <https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Partnerships/Donor%20Countries/Partners-for-change-Japan-en.pdf>
- Bureau of Justice Statistics. (2008, Agustus). *Criminal Victimization in the United States, 2006 Statistical Tables*. Retrieved from [bjs.ojp.gov](https://bjs.ojp.gov/content/pub/pdf/cvus0601.pdf): <https://bjs.ojp.gov/content/pub/pdf/cvus0601.pdf>
- Caglar, G. (2013). Gender Mainstreaming. *POLITICS & GENDER*, 9 (3) .
- Campbell, A. (2020). *An increasing risk of family violence during the Covid-19 pandemic: Strengthening community collaborations to save lives*. *Forensic Sci. Int.*
- Chang, M. (2009). *The Politics of an Apology: Japan and Resolving the "Comfort Women" Issue*. Retrieved from [jstor.org](https://www.jstor.org/stable/42763319): <https://www.jstor.org/stable/42763319>
- Council of Europe. (n.d.). *What is gender mainstreaming?* Retrieved from [coe.int](https://www.coe.int/en/web/genderequality/what-is-gender-mainstreaming): <https://www.coe.int/en/web/genderequality/what-is-gender-mainstreaming>
- European Union. (2023, Juni 13). *EU measures to end violence against women*. Retrieved from [consilium.europa.eu](https://consilium.europa.eu)
- Fraser, E. (2020). *Impact of COVID-19 Pandemic on Violence against Women and Girls, VAWG Helpdesk Research Report No. 284*. London: VAWG Helpdesk.
- Fröhlich, S. (2022, Agustus 26). *How African women suffer silently through abuse*. Retrieved from [dw.com](https://www.dw.com/en/abuse-how-african-women-suffer-in-silence/a-62935824#:~:text=According%20to%20a%202020%20study,genital%20mutilation%20and%20human%20trafficking): <https://www.dw.com/en/abuse-how-african-women-suffer-in-silence/a-62935824#:~:text=According%20to%20a%202020%20study,genital%20mutilation%20and%20human%20trafficking>.
- García-Moreno, C., Pallitto, C., Devries, K., Stöckl, H., Watts, C., & Abrahams, N. (2013). *Global and Regional Estimates of Violence Against Women: Prevalence and Health Effects of Intimate Partner Violence and Non-Partner Sexual Violence*. Geneva, Switzerland: World Health Organization.
- Gregor, K. M. (2017). *Piecing Together The Threads Of The So-Called 'Comfort Women' System During The Japanese Occupation Of Indonesia*. Yogyakarta: [sejarah.fib.ugm.ac.id](http://sejarah.fib.ugm.ac.id).
- Guterres, A. (2018, November 19). *Remarks on International Day for the Elimination of Violence against Women*. Retrieved from [un.org](https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2018-11-19/international-day-for-elimination-of-violence-against-women-remarks): <https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2018-11-19/international-day-for-elimination-of-violence-against-women-remarks>
- Hayashi, M. N., Bagale, A. D., Marzouk, M., Ung, M., Lam, S. T., Neo, P., & Howard, N. (2022). Gender-Based Violence in the Asia-Pacific Region during COVID-19: A Hidden Pandemic behind Closed Doors. *International Journal of Environmental Research and Public Health*.
- Koyama, S. (2012). *Rysai Kenbo: The Educational Ideal of 'Good Wife, Wise Mother' in Modern Japan (The Intimate and the Public in Asian and Global Perspectives)*. Leiden ; Boston: BRILL.

- Luluhima, A. S. (2000). *Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: Alumni.
- Mardatillah, Z. J. (2022). Analisis Motivasi Pemerintah Jepang terhadap Kasus Jugun Ianfu di Korea.
- Maura, Z. S. (2022). Dukungan Jepang Terhadap Un Women Terkait Pemberantasan Kekerasan Perempuan Pada Saat Pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 260.
- Nasukawa, T. (2017). Human Security in Japanese Foreign Policy: A Challenge to Peacebuilding.
- National Population Commission. (2019). *Nigeria demographic and health survey 2018*. Abuja : National Population Commission.
- OECD. (n.d.). *Japan*. Retrieved from [oecdbetterlifeindex.org: https://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/japan/](https://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/japan/)
- OHCHR. (1993, December 20). *Declaration on the Elimination of Violence against Women*. Retrieved from [ohchr.org: https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence-against-women](https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence-against-women)
- Oi, M. (2021, April 19). *Mengapa ketimpangan gender dan seksisme di Jepang sulit diatasi?* Retrieved from [bbc.com: https://www.bbc.com/indonesia/vert-cap-56743670](https://www.bbc.com/indonesia/vert-cap-56743670)
- Ojong, P. (2006). *Perang Pasifik*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Padiatra, A. M. (2020). Jejak Sakura di Nusantara: Pasang Surut Hubungan Jepang-Indonesia Tahun 1880an–1974. *Sasdaya: Gajah Mada Journal of Humanities*, 4(1), 1-12.
- Partners West Africa Nigeria. (2020, April 23). *Rapid assessment of COVID-19 pandemic on Nigerian women*. Retrieved from [partnersnigeria.org: https://www.partnersnigeria.org/rapid-assessment-of-covid-19-pandemic-on-nigerian-women/](https://www.partnersnigeria.org/rapid-assessment-of-covid-19-pandemic-on-nigerian-women/)
- Rahma, A. D., Suswandari, & Naredi, H. (2020). Jugun Ianfu: Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Pada Masa Pendudukan Jepang di Jawa Barat Tahun 1942-1945. *Chronologia (2020) Vol. 1 No. 3*, 169-182.
- Rossa, V., & Putri, F. I. (2020, April 13). *Update Corona Covid-19 Global 13 April 2020: Total Kasus Nyaris 2 Juta*. Retrieved from [suara.com: https://www.suara.com/health/2020/04/13/090115/update-corona-covid-19-13-april-2020-total-kasus-nyaris-capai-2-juta](https://www.suara.com/health/2020/04/13/090115/update-corona-covid-19-13-april-2020-total-kasus-nyaris-capai-2-juta)
- Sari, A. Y. (2020). Ketidaksetaraan Gender sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan di Jepang. *Journal of International Relations* , 358-367.
- Saunders, R. (2021, Maret 29). *The push to find real solutions to sexual harassment is ongoing, even in 'safe' Japan*. Retrieved from [japantimes.co.jp: https://www.japantimes.co.jp/community/2021/03/29/issues/sexual-harassment-safe-japan/](https://www.japantimes.co.jp/community/2021/03/29/issues/sexual-harassment-safe-japan/)
- Sihite, R. (2007). *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Smith, S. G., Chen, J., Basile, K. C., Gilbert, L. K., Merrick, M. T., Patel, N., . . . Jain, A. (2017, April). *The National Intimate Partner and Sexual Violence Survey (NISVS): 2010-2012 State Report* . Retrieved from [cdc.gov: https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/NISVS-StateReportBook.pdf](https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/NISVS-StateReportBook.pdf)
- Soeroso, M. H. (2010). *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Statista Research Department. (2023, Juni 21). *Indeks kesenjangan gender di Jepang dari 2016 hingga 2023*. Retrieved from Statista: [https://www-statista-com.translate.google/?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tc&\\_x\\_tr\\_hist=true#statisticContainer](https://www-statista-com.translate.google/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc&_x_tr_hist=true#statisticContainer)
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Suryono, R. (2005). *Seks dan Kekerasan Pada Zaman Kolonial*. Jakarta : PT. Grasindo.
- Tijerina, C. (2020, September). *UN Women and Japan*. Retrieved from unwomen.org: <https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Partnerships/Donor%20Countries/Partners-for-change-Japan-en.pdf>
- Toer, P. A. (2001). *Perawan Dalam Cengkeraman Militer*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- True, J., & Mintrom, M. (2001). Transnational Networks and Policy Diffusion: The Case of Gender Mainstreaming. *International Studies Quarterly* 45 (1), 27–57.
- True, J., & Parisi, L. (2013). *Gender Mainstreaming Strategies in International Governance*. London: Routledge.
- UN Women. (2020). *About UN Women*. Retrieved from unwomen.org: <https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women>
- UN Women. (2020). *From Insight to Action Gender Equality in the Wake of Covid-19*. United States: UN Women.
- UN Women. (2021). *Top government partners*. Retrieved from unwomen.org: <https://www.unwomen.org/en/partnerships/donor-countries/top-donors>
- UN Women. (n.d.). *Partner spotlight: Japan*. Retrieved from unwomen.org: <https://www.unwomen.org/en/partnerships/donor-countries/top-donors/japan>
- UNFPA. (2020, April 27). *Impact of the COVID-19 Pandemic on Family Planning and Ending Gender-based Violence, Female Genital Mutilation and Child Marriage*. Retrieved from unfpa.org: [https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID-19\\_impact\\_brief\\_for\\_UNFPA\\_24\\_April\\_2020\\_1.pdf](https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID-19_impact_brief_for_UNFPA_24_April_2020_1.pdf)
- United Nations. (1993). *Declaration on the elimination of violence against women*. New York : United Nations.
- US Census Bureau. (2003, Februari). *National Crime Victimization Survey*. Retrieved from bjs.ojp.gov: <https://bjs.ojp.gov/content/pub/pdf/manual.pdf>
- Vieira, P. R., Garcia, L. P., & Maciel, E. L. (2020). Isolamento social e o aumento da violência doméstica: o que isso nos revela? *Rev Bras Epidemiol*.
- WHO. (2020, April 7). *COVID-19 and violence against women: what the health sector/system can do, 7 April 2020*. Retrieved from apps.who.int: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/331699>
- Wiasti, N. M. (2017). Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG). *Sunari Penjor: Journal of Anthropology*.
- World Health Organization. (2013, October 20). *Global and regional estimates of violence against women: Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence*. Retrieved from who.int: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241564625>
- World Health Organization. (2017, Desember 12). *Mental health of older adults*. Retrieved from who.int: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-of-older-adults>
- World Health Organization. (2020, April 7). *COVID-19 and violence against women*. Retrieved from who.int: <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-SRH-20.04>

- World Health Organization. (2021, Maret 9). *Violence against women Prevalence Estimates 2018*. Retrieved from who.int: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240022256>
- Yamaguchi, K. (2019, Maret). *Japan's Gender Gap – IMF Finance & Development Magazine*. Retrieved from imf.org: <https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2019/03/gender-equality-in-japan-yamaguchi>
- Yasmin, S. (2016, Februari 2). *The Ebola Rape Epidemic No One's Talking About*. Retrieved from foreignpolicy.com: <https://foreignpolicy.com/2016/02/02/the-ebola-rape-epidemic-west-africa-teenage-pregnancy/>
- Zhang, J., Sun, C., & Hu, Y. (2021). Representing Victims and Victimizer: An Analysis of #MeToo Movement Related Reports. *Women's Studies International Forum*, 1-7.